DANA HIBAH PARIWISATA

Paling Besar Hotel Peroleh Rp 1 Miliar

JOGJA, *Radar Jogja* - Dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf dalam proses pencairan oleh Pemkot Jogja. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha hotel dan restoran.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, ditargetkan pekan ini dana sudah bisa diterima oleh masing-masing hotel dan restoran yang telah ditetapkan sebagai penerima. "Nilai tertinggi yang diterima industri pariwisata adalah Rp 1 miliar, dan terendah ratusan ribu rupiah," katanya kemarin (7/12).

Kadri menjelaskan jumlah dana hibah pariwisata yang diterima oleh tiap pelaku hotel dan restoran tersebut bervariasi. Adapun nominal tertinggi ada satu hotel yang bisa memperoleh sebesar Rp 1 miliar. "Tapi ada juga yang hanya menerima kurang dari Rp 1 juta," ujarnya.

Kenapa bervariasi? Ini karena nominal yang diterima berdasarkan sumbangsih pajak yang telah disetorkan ke pemerintah. "Terkait penggunaan dana hibah pariwisata, ini menjadi kewenangan penuh bagi penerima sepanjang menunjang operasional," jelasnya.

Sehingga, penggunaan dana hibah pariwisata dia menyebut bisa dimanfaatkan untuk membayar gaji pegawai, menyiapkan prasarana, memeprkuat pemasaran dan lain sebagainya. Terkait penggunaan dan ini juga diwajibkan ada pelaporan pemanfaatannya. "Misal untuk gaji pegawai, bukti pembayarannya harus disertakan," terangnya.

> **Nilai tertinggi yang diterima industri pariwisata adalah Rp 1 miliar, dan terendah ratusan ribu rupiah."**
>
> **KADRI RENGGONO**
> *Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jogja*

Adapun, total hibah pariwisata yang diterima Kota Jogja mencapai sekitar Rp 33 miliar. Sebanyak 70 persen di antaranya diperuntukkan bagi hotel dan restoran, dan sisanya 30 persen dikelola oleh Dinas Pariwisata. Khusus bagi pelaku hotel dan restoran, semula terdapat 315 usaha yang lolos administrasi. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat, hanya 292 usaha yang berhak menerima. "Ada beberapa yang layak itu namun pemberkasannya terlambat. Sedang kami koordinasikan apakah masih bisa diusulkan lagi atau tidak," tambahnya.

Ketua BPD PHRI DIJ, Deddy Pranowo Eryono mengklaim dana hibah ini sangat dibutuhkan oleh para pengelola hotel. Setidaknya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pun jika masih tersisa dana tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan, hingga BPJS. "Semua harus ada pertanggungjawaban karena ini dana hibah, harus ada laporan ke pemerintah daerah," katanya.

Menurut dia, bantuan dana hibah ini bisa menjadi pelecut karena bisa mengurangi beban operasional yang selama ini juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Pun hotel yang masuk kriteria dapat bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan mulai dari memiliki tanda daftar usaha pariwisata hingga memiliki bukti pembayaran pajak pada 2019. "Hotel dan restoran di DIJ kurang lebih ada 500-an. Semua layak mendapatkan bantuan, tapi diprioritaskan yang memenuhi syarat itu," tambahnya. **(wia/pra/by)**

KONI

Kepengurusan Dapat Diperpanjang Enam Bulan setelah PON

JOGJA, *Radar Jogja* - KONI DIJ menyambut baik sejumlah perubahan kebijakan dalam AD/ART KONI pusat. Hal itu seperti yang ditetapkan dalam kegiatan Musornaslub yang digelar KONI Pusat secara virtual, Senin (7/12).

Salah satunya kebijakan tersebut yakni terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan Anggota KONI Pusat yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Ketua Bidang Pembinaan Organisasi KONI DIJ Nolik Maryono menjelasakan apabila terdapat KONI Provinsi/daerah, Pengurus Besar (PB), maupun Pengurus Pusat (PP) cabor yang berakhir masa kepengurusannya.

Sekaligus bersamaan dengan ajang olahraga *multievent* besar skala nasional seperti PON. Sehingga dapat diperpanjang sampai dengan enam bulan setelah PON. "Aturan ini sebelumnya mencantumkan dapat diperpanjang hingga tiga bulan," ujarnya saat mengikuti Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub).

Dalam Musornaslub kemarin juga ditetapkan ketua umum (Ketum) pengurus cabor dan badan fungsional anggota KONI diperkenankan untuk dipilih sebanyak tiga kali. "Dengan persyaratan tambahan jika dalam kegiatan pemilihan ketum ini tidak terdapat calon figur lainnya yang dapat dipilih. Juga harus memiliki dukungan 75 persen dari anggota cabor maupun badan fungsional," katanya.

Di sisi lain, kebijakan krusial lain yang tetap dan tidak berubah juga ditegaskan dalam kegiatan Musornaslub. Yakni perihal larangan rangkap jabatan secara vertikal maupun horizontal. Terutama untuk unsur pimpinan dalam sebuah organisasi olahraga baik KONI Provinsi/Daerah maupun cabor. Dalam anggaran dasar anggararan rumah tangga (AD/ART) KONI telah tercantum dan dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI DIJ Djoko Pekik Irianto mengatakan pihaknya akan mengembalikan kepada Anggota KONI DIJ terkait dengan pengajuan perpanjangan masa bakti kepengurusan tersebut. Sebab, masa bakti Kepengurusan KONI DIJ akan habis pada tahun 2021 mendatang. **(ard/pra/by)**

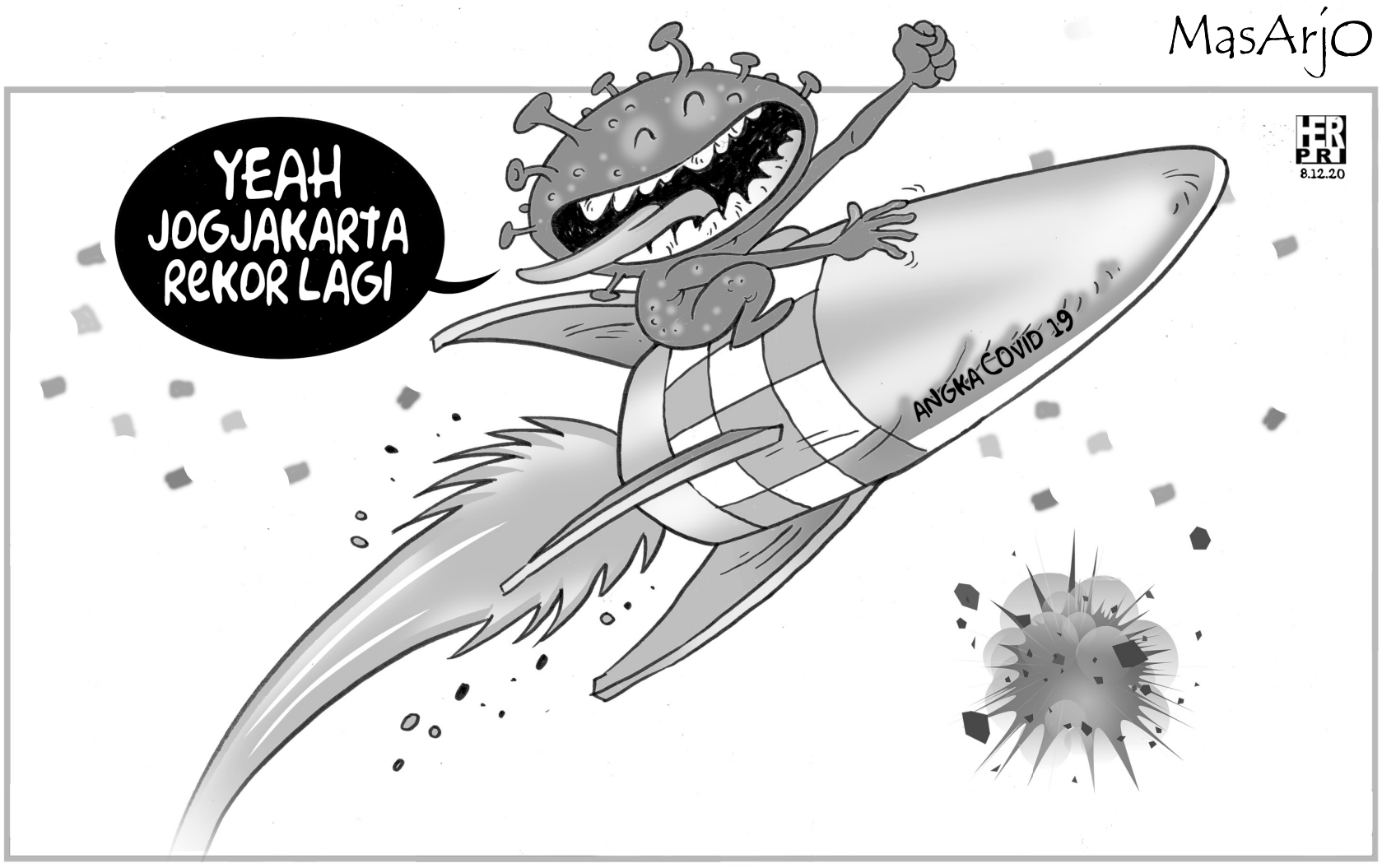

Berawal dari Riwayat Perjalanan Dinas

Lagi Dua Kepala OPD Positif Covid-19

JOGJA, *Radar Jogja* - Persebaran kasus Covid-19 kembali terjadi di lingkungan Pemkot Jogja. Teranyar, dua kepala OPD di Pemkot Jogja dinyatakan positif Covid-19 dan kategori dalam orang tanpa gejala (OTG).

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). "Di Kominfo (Diskominfosan) memang ada kepala dinas dan sekdin dan satu staf yang terkena. Makanya kami kurangi aktivitasnya beberapa teman di Kominfo," katanya di Tugu Pal Putih kemarin (7/12).

HP menjelaskan kasus ini berawal dari satu staf Diskominfosan yang terpapar Covid-19 setelah memiliki riwayat perjalanan luar kota dari Tangerang. Kemudian kontak terjadi, dan virus korona itu menularkan ke Kepala Diskominfosan dan Sekretaris Diskominfosan. "Dan sebaran dari kepala dinas Kominfo (Diskominfosan), semalam Kepala Dinas PU (DPUPKP) juga positif," ujarnya.

Kenapa *tracing* dilakukan hingga Kepala Dinas PUPKP? Ini karena setelah diketahui oleh tim Satgas bahwa Kepala Dinas PUPKP dan Diskominfosan tersebut pernah dalam satu kesempatan berada dalam satu forum bersama-sama

WINDA ATIKA IRA P / RADAR JOGJA
Heroe Poerwadi

belum lama ini. Sehingga, tes usap dilakukan dan dinyatakan positif. "Kondisi mereka semua OTG. Dan *tracing* masih bergulir, maka hari ini teman-teman PU sedang isolasi mandiri dan mau di-swab, tapi layanan masih bisa dilayani dengan baik," jelasnya.

Mantan wartawan itu tidak menampik, bahwa persebaran kasus Covid-19 semakin masif dan menyebar di lingkungan Pemkot Jogja. Antara lain Kantor Diskominfosan, Kantor BKPP, dan DPUPKP. Namun, kebijakan *work from home* (WfH) belum menjadi opsi yang diberlakukan untuk semua jajarannya. "Belum (wacana untuk WfH). Tapi sekarang, terutama untuk teman-teman dinas yang kena itu sebagian ya sudah WfH," terangnya.

Pun, Ketua DPD PAN Kota Jogja itu juga tidak mau gegabah. Dengan persebaran yang masif tersebut, belum berarti kasus di lingkungan pemkot itu bisa dikatakan sebagai klaster. Namun demikian, kasus dari Kepala Diskominfosan ke Kepala DPUPKP tersebut memang sudah generasi ke tiga.

"Nah apakah Pak Kadis PU ini dapatnya dari Pak Kepala Dinas Kominfo apa enggak belum tahu. Kalau itu dapatnya dari Kadis Kominfo ya mungkin sudah klaster. Tapi kalau itu bukan ya tidak," imbuhnya.

Pemkot dalam hal ini, masih menunggu keterangan dari Dinas Kesehatan. Apakah kasus Covid-19 pada Kepala Dinas PUPKP saling berkaitan dengan Kepala Diskominfosan.

"Apakah dari Kominfo pindah ke Dinas PU ada kaitannya atau tidak. Kalau ada kaitannya ya menjadi klaster itu," jabarnya.

Terpisah, Kepala DPUPKP Kota Jogja Hari Setyawacana mengatakan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah pribadinya. "*Alhamdulillah* saya tetap sehat saat ini. Untuk layanan kedinasan tetap jalan," ungkapnya. **(wia/pra/by)**

UAD FOR RADAR JOGJA
VIRTUAL: Peserta kuliah umum applied linguistics yang digelar prodi PBI FKIP UAD Jogjakarta dan diikuti sekitar 300 peserta.

PBI UAD Gelar Kuliah Umum Applied Linguistics

JOGJA, *Radar Jogja* - Program studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) FKIP Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogjakarta mengadakan kuliah umum dengan tema *Linguistic For English Teacher: What and Why?* yang dilaksanakan via *zoom meeting* dan *streaming YouTube*. Acara ini diikuti oleh sekitar 300-an peserta yang terdiri dari dosen, alumni, dan mahasiswa PBI UAD, serta Guru Bahasa Inggris di Jogjakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

Kuliah umum ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Prodi PBI, Dr. Ani Susanti, M.Pd. BI. Dimoderatori oleh Dosen PBI UAD Dr. Ikmi Nur Oktavianti, dan dipandu oleh pembawa acara Pamastu Narpaduita.

Narasumber, dosen pakar di bidang linguistik dari Universitas Negeri Malang dan Unisma Prof. A. Effendi Kadarisman, Ph.D. memaparkan materi tentang hubungan antara *Linguistics* dengan *English Language Teaching* (ELT).

"Linguistik dapat turut membantu ELT dalam menghadapi problem pengajaran dan pembelajaran, baik pada tingkat struktural maupun fungsional yang terkait dengan kesalahan dalam menghasilkan bentuk dan menggunakan fungsi komunikatif yang tepat," ujar Prof. Effendi Kadarisman, (7/12).

Menurut Prof. Effendi Kadarisman, Linguistik penting dan perlu dikuasai oleh (calon) pengajar Bahasa Inggris untuk membantu mengatasi kesalahan bahasa oleh pembelajar, yang umumnya berkaitan dengan tiga komponen bahasa. Yakni kosakata, tata bahasa, dan pelafalan. "*The better you know about Linguistics, the better you are able to describe and explain the nature of any language phenomena-not only errors in English, but also poetry and humor*," ungkap Prof. Effendi Kadarisman, menutup materinya.

Prof. Effendi Kadarisman juga menyelingi beberapa humor cerdas dan tips belajar dan mengajar linguistik serta membagikan pengalamannya dalam memberikan umpan balik untuk mahasiswanya. Pada kesempatan ini, dia juga memberikan beberapa kasus kesalahan bahasa dan mengoreksinya bersama peserta kuliah umum.

Seluruh peserta sangat antusias dalam mengikuti kuliah umum. Hal ini dibuktikan dengan komentar positif para peserta melalui *streaming* di YouTube dan banyaknya pertanyaan yang diberikan oleh peserta saat sesi tanya jawab. **(*/pra/by)**

SEPUTAR BEA DAN CUKAI

Anda ingin tahu hal-hal seputar Bea dan Cukai?
Silakan SMS ke **08112831051 (Informasi)**
08112831050 (Pengaduan)
atau telpon ke **(0274) 489405** ext. **111**

A to Z tentang Barang Kiriman/Paket dari Luar Negeri

BELANJA *online* dari luar negeri atau mendapat paket kiriman dari luar negeri? Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Pertama, minta nomor resi/*Consignment Note (CN)/AWB air way bill* kepada pengirim/penjual barang. Nomor ini pasti ada pada setiap barang kiriman dari luar negeri.

Kedua, *check* atau *tracking* status barang kiriman. Tracking barang kiriman dapat dilakukan secara mandiri melalui www.beacukai.go.id/barangkiriman atau dapat juga melalui aplikasi Mobile Bea Cukai yang dapat diunduh di *playstore*. *Tracking* dilakukan dengan memasukkan nomor resi/*Consignment Note* (CN)/AWB *air way bill*. Dari hasil *tracking* tersebut dapat diketahui tentang status barang kiriman.

Ketiga, *follow up* dari hasil *tracking* tersebut. Jika anda mendapati bahwa status barang kiriman anda adalah NPD (Nota Permintaan Dokumen/Data) itu artinya anda diminta untuk melengkapi dokumen/data yang diperlukan, misalnya *invoice*, bukti transaksi pembelian, atau dokumen lainnya yang diperlukan terkait dengan adanya aturan larangan dan pembatasan, misalnya untuk produk obat dan makanan harus ada ijin dari BPOM, untuk produk tumbuhan/hewan harus ada ijin dari balai karantina, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikirimkan langsung ke kantor pos Plemburan Yogyakarta atau melalui email : beacukai.poslalubea@gmail.com

Keempat, membayar/melunasi tagihan pungutan negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM, dan PPh Ps.22 impor). Pembayaran dapat dilakukan melalui bank/pos persepsi berdasarkan *kode billing* yang diterbitkan oleh kantor bea cukai.

Berapa tarif Bea Masuk (BM) dan Pajak impor atas barang kiriman? Barang kiriman dengan nilai FOB :

- s.d. USD 3, dibebaskan dari BM, namun dikenakan PPN 10 persen
- USD 3 s.d. USD 1.500, dikenakan BM 7,5 persen dan PPN 10 persen

Dikecualikan dari ketentuan ini adalah tiga jenis barang, yaitu :

- Tas, BM : 15-20 persen
- Sepatu, BM : 25-30 persen
- Produk tekstil, BM : 15-25 persen

- *Plus* PPN 10% dan PPh 7,5-10 persen
- Lebih dari USD 1.500 dikenakan tarif MFN (tarif umum)

Kelima, setelah melakukan pembayaran maka barang kiriman dapat diambil ke kantor pos atau petugas kantor pos akan mengantarkan paket barang kiriman ke alamat penerima barang.

Keenam, jika Anda tidak setuju dengan keputusan/penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, maka dapat mengajukan keberatan (proses keberatan atas penetapan nilai pabean akan dibahas pada edisi selanjutnya).

Ketujuh, waspada tentang penipuan terkait barang kiriman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Jangan pernah melakukan transfer sejumlah uang ke rekening pribadi seseorang. Ingat, bahwa tagihan pungutan negara hanya dibayarkan melalui bank/kantor pos persepsi berdasarkan kode billing yang diterbitkan oleh kantor bea cukai.
- Jika pada saat anda melakukan tracking dengan memasukkan nomor resi/nomor CN/nomor AWB dan data/barang kiriman anda tidak ditemukan, maka Anda patut curiga akan terjadinya penipuan.

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN YOGYAKARTA
SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
Jl. Solo Km. 9-10 Yogyakarta 55282
website: www.bcyogyakarta.beacukai.go.id

Terbit Setiap Minggu II dan IV
Kerjasama antara RADAR JOGJA & KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) Tipe Madya Pabean Yogyakarta